

**Judul** : DPR mulai uji calon Hakim Agung  
**Tanggal** : Selasa, 09 September 2025  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## DPR Mulai Uji Calon Hakim Agung

DPR menyampaikan sejumlah kritik terkait proses seleksi hakim agung yang dilakukan Komisi Yudisial. Di sisi lain, KY menegakkan seleksi berlangsung ketat, transparan, dan bebas titipan.

**JAKARTA, KOMPAS** — Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan terhadap 16 calon hakim agung dan hakim *ad hoc* Mahkamah Agung pada Selasa (9/9/2025) ini. Sejumlah anggota Komisi III mengkritik proses seleksi oleh Komisi Yudisial atau KY yang dinilai pasif dan masih meloloskan calon bermasalah. Namun, KY menegakkan seleksi berjalan transparan, tanpa calon titipan.

Uji kelayakan diikuti 13 calon hakim agung dan tiga calon hakim *ad hoc* HAM. Mereka telah melewati tahapan seleksi KY, mulai dari administrasi, uji kualitas mencakup karya profesi, penulisan, studi kasus hukum, studi kasus kode etik dan pedoman perilaku hakim, hingga tes obyektif serta pemeriksaan kesehatan. Dari total 183 pendaftar calon hakim agung dan 24 pendaftar calon hakim *ad hoc* HAM, hanya 16 orang tersebut yang lolos.

Seleksi dilakukan menyusul permintaan Mahkamah Agung (MA) pada 17 Februari 2025 agar KY segera mengisi kelosongan 17 kursi hakim agung dan 3 hakim *ad hoc* HAM. Permintaan itu mencakup 5 hakim agung kamar pidana, 5 hakim agung kamar perdata, 2 hakim agung kamar agama, 1 hakim agung kamar militer, 1 hakim agung kamar tata usaha negara (TUN), 5 hakim agung kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim *ad hoc* HAM.

Komisi III DPR telah menyusun jadwal uji kelayakan dan keputusan (*fit and proper test*) terhadap calon hakim agung serta hakim *ad hoc* MA tersebut. Berdasarkan dokumen yang diterima *Kompas*, rangkaian uji kelayakan akan digelar 9-16 September serta langsung dilanjutkan rapat pleno penetapan calon hakim agung dan hakim *ad hoc* MA tahun 2025.

Pada Selasa (9/9), uji kelayakan dimulai dengan calon hakim agung Heri Prasno, Badi Nugroho, Amas Mustajin, dan Hari Sugiharto. Keesokan harinya, Rabu (10/9), giliran calon hakim agung Triyono Martanto, Agustinus Purnomo Hadi, Diana Maiminta Ginting, dan calon hakim *ad hoc* Bonifasius Nadya Arybowo.

Sesi berikutnya digelar Kamis (11/9) dengan agenda uji kelayakan terhadap calon hakim agung Julius Panjaitan, Alim Ribut Supono, Mubayyah, dan Enzal Hasamuddin. Adapun pada Selasa (16/9), uji kelayakan dilanjutkan dengan calon hakim agung Suradi, Agus Budianto, Laifalul Arotah, dan Nuguh Haryadi.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhan meyakini siapa pun KY yang dinilai terlalu pasif dalam proses seleksi awal calon hakim agung. Padahal, menurut dia, pencarian calon yang berintegritas dan berprestasi se-



Rapat Komisi III DPR membahas seleksi calon hakim agung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (8/9/2025). Komisi III DPR menerima 13 nama calon hakim agung dan tiga calon hakim agung *ad hoc* dari Komisi Yudisial sebagai panitia seleksi untuk diseleksi digelar pada Selasa (9/9).

harusnya dilakukan lebih aktif, bukan hanya menunggu pendaftaran mandiri. Menurut Habiburokhan, banyak hakim berkualitas yang tidak pernah mendaftar karena sifatnya rendah hati. Padahal, hakim hakim tersebut dinilai mampu menjaga integritas serta menghasilkan putusan yang dirasakan adil, terutama bagi masyarakat kecil.

"Saya yakin, KY tahu di mana bibit-bibit unggul itu berada. Hakim yang bertugas di daerah terpencil, yang tetap berintegritas dan berpihak kepada rakyat kecil. Mereka perlu didorong agar mau mendaftar. Bukan diberi tiket khusus, tetapi dilakukan tes. Namun, jangan sampai mereka hilang dari radar seleksi," ujar Habiburokhan dalam rapat Komisi III DPR bersama KY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/9).

La menegakkan, KY sebagai lembaga pengawas peradilan seharusnya memiliki metode *talent scouting* untuk mengidentifikasi calon potensial. Dengan begitu, seleksi calon hakim agung bisa menghasilkan figur-figur terbaik yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas tinggi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, turut mengkritik metode seleksi calon hakim agung oleh KY. Menurut dia, pola seleksi yang pasif tidak efektif untuk menjangkau calon terbaik. "Kami melihat ada banyak

hakim yang bagus di Jakarta ini. Mending *talent scouting* biasa dia paralel dengan metode seleksi pasif KY," im- jadi, untuk seleksi tahun depan, sudah ada orang-orang yang diundang khusus dan *talent scouting* dilakukan baik," ucapnya.

### Calon lolos terus

Hinca berharap KY bisa memberikan catatan yang cukup mengenai para calon hakim agung sebagai bahan pendalaman uji kelayakan di Komisi III DPR. Dengan begitu, calon yang terpilih benar-benar mampu menegakkan negara tuhan yang adil di Indonesia.

"Tapi, kenapa ada satu calon berkali-kali lolos terus. Dari sisi positif, baik juga, ya, mentalnya luar biasa. Main terus sampai ujung baik juga. Tapi, apakah tinggal itu stok hakim pajak? Atau ada yang lain?" kata Hinca. Ia juga meminta KY menyiapkan gambaran utuh sebelum uji kelayakan dilakukan, meliputi penggunaan anggaran seleksi, proses seleksi yang sudah berjalan, hingga strategi KY dalam memenuhi kebutuhan hakim agung.

Kritik juga datang dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono. Ia menyebut sejumlah calon hakim agung yang dinilai takan lolos seleksi KY memiliki riwayat dugaan plagiarisme.

Menurut dia, kepercayaan publik terhadap MA saat ini sudah tergerus akibat penang-

kapan sejumlah hakim karena kasus suap. Namun, Komisi III justru mendapati dalam daftar calon hakim agung yang disodorkan panitia seleksi pimpinan Ketua KY Amzulian Rifai masih ada nama yang dianggap tidak memenuhi kepatantasan.

"Ada beberapa nama calon yang saya lihat dulu pernah melakukan plagiat, kenapa harus masuk lagi dalam seleksi ini. Apa keputusan dari KY sehingga tetap memperlasi hal-hal seperti ini?" ujar Bimantoro.

Ia mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas proses seleksi calon hakim agung. Ia menegakkan tidak memiliki masalah pribadi dengan calon yang melakukan plagiarisme, tetapi heran mengapa KY tetap meloloskan mereka.

### Bantah calon titipan

Menanggapi kritik Komisi III DPR, Ketua KY Amzulian Rifai memastikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Ia menegakkan KY tidak hanya pasif menunggu calon mendaftar.

"Pertanyaannya adalah apakah kita tidak ada upaya secara aktif mencari calon? Tentu ada, bahkan Ketua Mahkamah Agung itu biasanya menyarankan kepada para hakim tinggi yang menurut beliau baik, itu saya komunikasi langsung," ujar Amzulian.

Namun, lanjutnya, ada dilema yang muncul dalam pelaksanaan *talent scouting*. Meski

ada calon yang dinilai baik dalam kesehariannya, mereka tetap harus mengikuti seluruh mekanisme seleksi yang ketat.

Amzulian menambahkan, KY juga menghubungi sejumlah hakim yang dibesal untuk ikut seleksi calon hakim. Dari 161 orang yang lolos seleksi administrasi, sebagian di antaranya merupakan hasil pendekatan aktif.

Terkait calon yang berulang kali ikut seleksi, Amzulian menegakkan tidak ada aturan yang membatasi hal itu. Ketetapan sebelumnya yang mewajibkan jeda setelah dua kali seleksi kini telah dicabut.

Ia juga menepis tuduhan plagiarisme terhadap salah satu calon. Menurut dia, tuduhan itu tidak terbukti karena karya yang dinilai merupakan hasil tulisan sendiri.

"Menurut kami itu tidak plagiat, bisa diperdebatkan, antara lain setelahnya waktu kami menilainya, yang dipagiasi itu karyanya sendiri, itu dasarnya," kata Amzulian.

Ia menegakkan proses seleksi calon hakim agung dilakukan berpihak untuk menjamin integritas kandidat. Seluruh tahapan mengedepankan asas partisipasi dan akuntabilitas.

Amzulian juga memastikan tidak ada titipan dalam daftar calon hakim agung ataupun hakim *ad hoc* HAM yang diserahkan ke DPR. Ia menegakkan, semua calon yang diusulkan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (BOW)